

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI PT. KTC MAKASSAR
(PERSPEKTIF HUKUM TATANEGARA ISLAM)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam

Pada Fakultas Syariah Dan Hukum

Uin Alauddin Makassar

Oleh:

SUMAENI

Nim: 10200114220

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumaeni
NIM : 10200114220
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar/ 11 Juni 1995
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Alamat : BTN Anugerah Resky Paccinongan
Judul : Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Dib
PT. KTC (Perspektif HukumTatanegara Islam)

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa , 13 Desember 2018

Penulis

SUMAENI
NIM. 10200114220

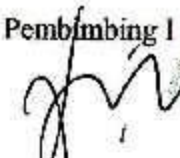
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **SUMAENI, NIM: 10200114220**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul, **"Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Hukum Tatanegara Islam"** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang ujian hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata, 9 Agustus 2018

Pembimbing I


Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi

Nip. 19740627 200604 2 002

Pembimbing II


Rahmiati, M. Pd

Nip. 19771005 200901 2 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Using Audio-Visual Aids to Improve the Students' Listening Ability at SMAN 5 Sinjai Utara", yang disusun oleh Nurfadillah Yunus, NIM: 20400114053, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan heberapa perbaikan.

Samata – Gowa, 28 Februari 2019 M
23 Jumadil Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI (SK. Dekan No. 442 Tahun 2019)

Ketua : Dr. Muljono Damopolit, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Hamka Ilyas, M.Th.I.
Munaqisy I : Dr. Kamsinah, M.Pd.I.
Munaqisy II : Dr. Sitti Nurpahmi, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing I : Dr. Hj. Djuwairiah Ahmad, M.Pd., M.TESOL.
Pembimbing II : Indah Fadhilah Rahman, S.Pd.L., M.Hum.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.
NIP. 19730120 200312 1 001

2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si. dan Dr. Kurniati, M.HI masing-masing selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Dr. Kurniati, M.HI selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, waktu dan dukungan, dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini di sela-sela kesibukannya. Dan Hj. Rahmiati, M,Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag selaku penguji I dan Subehan Khalik, S,Ag. Selaku penguji II.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Staff Pegawai yang telah membantu dalam kelancaran akademik.
7. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta staffnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Teman-teman Angkatan HPK 2014 Contetusa, dan khususnya HPK E atas kebersamaannya selama ini, karena kalian, sehingga mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Saudari-saudariku seperjuanganku tempat mengeluh dan berbagi cerita, Mastura, S.H, Nurul Nasfa, S.H, Rafika Sari, S.H, Musdalifa A, S.H, Nur Hikmayani, S.H, Atira Julianti, S.H, dan Febriani Asbar, S.H.

10. Kakanda Heri Ismawanto, S.Pd. yang senantiasa membantu dan mendampingi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman KKN Angkatan 58 Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, yang pernah mengisi hari-hari penulis selama 40 Hari.
12. Teman-teman seperjuangan di RB. Paradox yang senantiasa memberikan saran dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt. senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Upaya penulisan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu mohon saran atau kritikan dari pembaca untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.



SUMAENI

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan	10
BAB II TINJAUAN TEORI.....	12-38
A. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	12
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	12
2. Sejarah Pembentukan BPJS.....	12
3. Fungsi Dan Tugas BPJS Dalam Bidang Kesehatan.....	17
4. Program Kerja BPJS.	18
5. Metode Pendaftaran Kepesertaan BPJS.....	19
6. Ketentuan Iuran BPJS Kesehatan	22
B. Teori-teori Jaminan Sosial Dalam Hukum Tata Negara Islam.....	23
1. Pengertian Hukum Islam.....	23
2. Kategori Hukum Dalam Islam.....	25

3. Jaminan Sosial Dalam Perspektif Hukum Tatanegara Islam.	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39-44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Instrumen Penelitian	42
F. Teknik Pengolahan Data	43
BAB IV PELAKSANAAN UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM TATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM PADA PT. KTC.....	45-56
A. Gambaran Umum PT. Katingen Timber Celebes	45
B. Pelaksanaan UU NO. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pada PT. KTC	50
C. Pandangan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pada PT. KTC	54
BAB V PENUTUP	57-59
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (denga ntitik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	A postrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fat ah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>ammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fat ahdanyā'</i>	Ai	a dani
اَوَّ	<i>fat ahdanwau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Contoh:

مَاتَ : *m ta*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. *T 'Marb ah*

Transliterasi untuk *t 'marb ah* ada dua, yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t 'marb ah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalaupun kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- at f l*

الْمَدِينَةُ الْفَاهِلَةُ : *al-madinah al-f dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini di lambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia di transliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

رَبَّنَا : *rabban*

نَجَّيْنَا : *najjain*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نَعَم : *nu''ima*
عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf *kasrah*, maka ia di transliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruflangsung yang mengikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْس : *al-syams* (bukanasy-syam)
الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)
الْفَلْسَفَة : *al-falsalah*
الْبَلَاء : *al-bil d*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

تَأْمُرُونَ : *ta'mur n*
النَّوْع : *al-nau'*

شيء : syai'
أمرت : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zil l al-Qur' n

Al-Sunnahqabl al-tadwin

Adapun *t' marbutah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafz al-jal lah*, di transliterasikan dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatill h*

9. Laf al-Jal lah(الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frase nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *t' marb ah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *laf al-Jal lah* di transliterasi dengan huruf [t].

دِينُ اللَّهِ : *d null h*
هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, di gunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wam Muhammadunill rasul

Inna awwalabaitinwudi'alinn siIallazi bi Bakkatamub rakatan

Syahru Ramad n al-laziunzilafiih al-Qur' n

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

ABSTRAK

Nama :Sumaeni

Nim :10200114220

Judul Skripsi :Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. KTC (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. KTC (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-*breakdown* pada beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: a. Untuk mengetahui pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di PT KTC. b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan UU No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial di PT. KTC. c. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penyelenggaraan jaminan sosial.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, upaya untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) adapun alasan peneliti melakukan penelitian yaitu peneliti tertarik mengkaji bagaimana penerapan sistem BPJS (Badan penyelenggara jaminan sosial) kesehatan pada perusahaan PT. KTC. Peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara analisis data.

Pada prakteknya Pada PT. KTC tidak melaksanakan BPJS Kesehatan sebagaimana yang terkandung dalam UU No 24 tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan pasal 19 ayat 2 yang berbunyi “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS” dengan tidak menyetorkan Iuran bulanan yang menjadi tanggung jawabnya selama 4 bulan terakhir. Hal ini sudah sangat jelas melenceng dari asas penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta sudah tidak sesuai dengan Syari’ah dan jelas melanggar ketentuan Syirkah dan prinsip ta’awun. Maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Katingan Timber Celebes sudah melenceng dari ketetapan syirkah dengan prinsip ta’awun dan tidak sesuai dengan Hukum Tata Negara Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1. Pihak Perusahaan harus melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan Iuran bulanan BPJS karyawan PT. KTC dengan tepat waktu, agar karyawan dapat memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya sehingga kinerja karyawan tidak terganggu karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan saat membutuhkan pengobatan. 2. Pihak yang menangani BPJS kesehatan karyawan PT. KTC agar senantiasa memperbaharui data karyawan, jika ada perubahan keanggotaan agar tidak terjadi lagi peristiwa penolakan karyawan yang datang ke paskes yang bersangkutan namun ditolak untuk diberikan pelayanan kesehatan diakibatkan oleh tidak aktifnya keanggotaan karyawan karena pihak perusahaan tidak membayarkan Iuran bulanan karyawannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Sebuah negara dapat dikatakan berhasil jika tujuan pembangunan nasional dapat terwujud. Poin utama dalam tercapainya tujuan pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat mulai dari kebutuhan pokok sandang pangan dan papan hingga sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan secara menyeluruh dan dirasakan semua anggota masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita yang di rumuskan oleh pendiri bangsa ini. Kesejahteraan tersebut yaitu berdasarkan Pancasila, yakni masyarakat yang berkeadilan sosial yang di bangun berdasarkan kegotong-royongan serta rasa kebersamaan. Tentu Masyarakat yang sejahtera hanya dapat diwujudkan oleh manusia yang memiliki jati diri bangsa, yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Meskipun demikian, berbagai rumusan yang terkandung dalam Pancasila memerlukan *the road map* agar dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.¹ Cita-cita mewujudkan masyarakat sejahtera itu, sebagaimana terkandung dalam Pancasila/UUD 1945 maupun UUD 1945 hasil amandemen (2002), khususnya dalam Bab XIV PASAL 33 dan 34 yang bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan.

¹Sulastomo, *Sistem jaminan sosial nasional sebuah introduksi* (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2008) h. iii.

Sebelum amandemen, Bab XIV UUD 1945 merupakan bab yang membahas mengenai kesejahteraan sosial. Dalam bab ini, program-program perekonomian merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (Pasal 33 UUD 1945). Setelah amandemen, Bab XIV menjadi bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Namun, dalam Pasal 34 ayat 2, diperjelas cara pencapaian kesejahteraan itu. Pasal 34 ayat 2 berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.² Hal tersebut demi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat guna meringankan beban kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Jaminan sosial merupakan sebuah bentuk perlindungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat yang layak guna kesejahteraan masyarakat menengah kebawah.

Berarti mendapatkan jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat dari UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dan juga pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan³ agar kiranya masyarakat mendapatkan hak-haknya sebagai warganegara yang dilindungi haknya untuk mendapatkan kesejahteraan.

²Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi* h. iii-v.

³Much Nurachmad, *Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*, (Jakarta: Visimedia, 2009)h. 85.

Masyarakat kelas menengah kebawah seringkali diperhadapkan oleh masalah dimana mereka tak dapat menikmati layanan kesehatan dan pengobatan saat mereka sakit diakibatkan mahalny biaya pengobatan. Mahalnya biaya pengobatan tak jarang membuat nyawa masyarakat harus melayang akibat tak mendapatkan pertolongan medis yang biayanya sangat mahal. Hadirnya jaminan kesehatan masyarakat sedikit meringankan beban masyarakat.

Dari undang-undang Nomor 24 tahun 2011 ini dibentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu; BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.⁴ yang sebelumnya diselenggarakan oleh PT. Askes Idonesia menjadi BPJS Kesehatan dan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan mempunyai manfaat besar bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hal ini hendaknya disadari karena dengan perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan yang dibuat dan ditaati secara baik akan dapat menciptakan suatu ketenangan kerja, jaminan kepastian hak dan kewajiban baik pihak buruh maupun majikan. Akibat lebih jauh nanti produktivitas akan semakin meningkat, sehingga pengusaha akan dapat mengembangkan perusahaannya dan lebih dapat membuka lapangan kerja baru. Disamping itu akan berarti pula ikut berpartisipasi dalam pembangunan Nasional sebagaimana yang diharapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.⁵

⁴UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 5-6.

⁵Zaenal Asikin, Agusfian Wahab, Zaeni Asyhadie, Lalu Husni, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) h. 66.

Pengusaha wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti serta mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta jaminan sosial yang diikuti. Para Pengusaha juga berkewajiban memungut iuran dari pekerjaannya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkannya kepada BPJS secara berkala.⁶ Semua pengusaha diwajibkan mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta wajib mendaftarkan seluruh karyawannya.

Pengusaha juga berkewajiban melaporkan kepada badan penyelenggara jika terjadi perubahan data perusahaan, penambahan pekerja, pengurangan pekerja karena pekerja berhenti bekerja atau meninggal dunia, perubahan atas identitas data pekerja dan susunan keluarga serta perubahan upah dan atau pekerja.⁷ Jadi semua perubahan data yang berkaitan dengan para karyawan senantiasa terbaharui dan konkrit datanya pada BPJS.

Namun pada prakteknya banyak perusahaan yang belum melaksanakan UU nomor 14 tahun 2011 secara menyeluruh, misalnya di PT. Katingen Timber Celebes Makassar banyak karyawan yang mengeluh karena kartu BPJS kesehatan mereka belum diaktifkan sedangkan setiap bulannya iuran BPJS Kesehatan terpotong setiap bulannya dari gaji mereka. Ini menyebabkan para karyawan yang membutuhkan pengobatan terbengkalai karena tidak mendapatkan perawatan dikarenakan keanggotaan mereka tidak diaktifkan disebabkan tidak terbayarnya iuran wajib. Pihak

⁶Much Nurachmad, *Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)* (Jakarta: Visimedia, 2009)h. 86.

⁷Much Nurachmad, *Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*, h. 88.

pimpinan perusahaan terindikasi tidak membayarkan iuran BPJS kesehatan beberapa karyawannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di PT KTC Persero Makassar”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di PT Katingen Timber Celebes (KTC) Makassar” Perspektif Hukum Tatanegara Islam..

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: Pencegahan Fraud dalam pelaksanaan BPJS di Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit Dr. Tajuddin, M.Pd Makassar) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

- a. UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial.
- b. BPJS Kesehatan adalah cabang Program jaminan sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- c. PT. *Katingan Timber Celebes* adalah sebuah perusahaan produsen *Plywood* terbesar di Sulawesi selatann.

- d. Hukum Tatanegara Islam adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala sesuatu yang mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kedaulatan negara, lembaga-lembaga negara, hak-hak dan kewajiban negara dengan prinsip ke-Islaman yakni prinsip-prinsip bernegara yang sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang berpedoman pada AL-Qur'an dan Hadis.
- e. Syirkah adalah bentuk kerjasama syariah dalam bidang muamalah. Dimana prinsip syirkah adalah untuk tolong menolong. *syirkah* yang diartikan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja, pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Peraturan perundang-undangan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial.
BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan adalah cabang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
PT. Katingan Timber Celebes	Sebuah perusahaan produsen <i>Plywood</i>

	terbesar di Sulawesi selatan.
Hukum Tata Negara Islam	Hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara dan segala sesuatu yang mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kedaulatan negara, lembaga-lembaga negara, hak-hak dan kewajiban negara dengan prinsip ke-Islaman yakni prinsip-prinsip bernegara yang sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang berpedoman pada AL-Qur'an dan Hadis.
Syirkah	Bentuk kerjasama syariah dalam bidang muamalah. Dimana prinsip sirqah adalah untuk tolong menolong. <i>sirqoh</i> yang diartikan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja, pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat di kemukakan pokok masalah yaitu, bagaimana Pelaksanaan UU NO 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Katingen Timber Celebes (KTC) Perspektif

Hukum Tata Negara Islam (HTNI)? Berdasarkan pokok masalah, dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT.KTC ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan UU No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial di PT. KTC?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Tatanegara Islam terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada PT. KTC?

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberaa literature yang dijadikan acuan dasar, antara lain :

1. Sulastomo, dalam bukunya “ Sistem Jaminan Sosial Nasional sebuah introduksi” kelebihan buku ini membahas mengenai kesejahteraan sosial dan amandemen Undang- undang mengenai Badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Dalam buku ini tidak memuat hasil amandemen terbaru akan tetapi buku ini sangat membantupenelitian karena memuat perkembangan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia.
2. Zaeni Asyhadie dan Budi sutrisno, dalam bukunya “Hukum Perusahaan & Kepalitan” kelebihan buku ini membahas tentang Hukum perusahaan dan kepalitan yang lebih mengutamakan beberpa istilah, yakni pengertian dan sumber hukum perusahaan, pengusaha dan para pembantunya; bentuk-bentuk perusahaan bukan badan hukum, perseroan terbatas, koperasi, badan usaha milik negaradan kepalitan yang disusun secara sistematis. Namun buku ini tidak membahas mengenai Pelaksanaan UU NO 24 Tahun 2011 Tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan tetapi buku ini sangat membantu peneliti karena didalamnya membahas sumber hukum yang mengatur antara perusahaan, pengusaha dan pekerja.

3. Zaenal Asikin, Agusfian Wahab, Zaeni Asyhadie, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Perburuhan” kelebihan buku ini fokus membahas permasalahan perburuhan, manfaat perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan, pekerja, organisasi serikat pekerja. Namun buku ini tidak membahas Tinjauan Pelaksanaan UU NO 24 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan tetapi buku ini sangat membantu peneliti karena membahas beberapa permasalahan yang dapat timbul antara pengusaha dan pekerja.
4. Much Nurachmad “Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)” kelebihan buku ini membahas pertanyaan seputar pengertian tenaga kerja kontrak, undang-undang ketengakerjaan, perjanjian kerja dan hak-hak tenaga kerja kontrak. Namun buku ini hanya terfokus pada hak-hak tenaga kerja kontrak akan tetapi buku ini sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian karena membahas hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja kontrak.
5. Hasbullah Thabrany “Jaminan Kesehatan Nasional” kelebihan buku ini membahas berbagai argument yang melatarbelakangi pengaturan jaminan kesehatan nasional sebagai salah satu program dalam sistem jaminan sosial nasional. Namun buku ini tidak membahas pelaksanaan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial di PT. KTC Persero

Makassar akan tetapi buku ini sangat membantu peneliti karena membahas sistem kesehatan nasional.

6. Muhammad Iqbal “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” Kelebihan buku ini adalah mengolaborasi sketsa hitoris praktik dan pemikiran Ketatanegraan yang pernah berkembang dalam sejarah Islam. Buku ini sangat membantu peneliti, namun buku ini tidak membahas Pelaksanaan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS di PT. KTC Perspektif Hukum tatanegara Islam.
7. Ramdhani Abdullah dan Ramdhani Muhammad Ali, dalam Jurnalnya “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” membahas mengenai konsep pelaksanaan kebijakan publik yang memeberikan penerangan bagaimana konsep pelaksanaan kebijakan Publik pada umumnya yang selama ini masih kurang dipahami orang banyak. Jurnal ini sangat membantu peneliti dalam memahami konsep pelaksanaan kebijakan. Namun, buku ini tidak membahas secara langsung Pelaksanaan UU No. 24 tahun 2011 Tentang BPJS di PT. KTC (Perspektif HTNI).

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka hal yang menjadi tujuan penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di PT KTC.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan UU No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial di PT. KTC.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penyelenggaraan jaminan sosial.

2. Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi para pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di PT KTC (Perspektif Hukum Tata Negara Islam).

a. Secara Praktis

1. Memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana pelayanan yang seharusnya diperoleh serta mengajak masyarakat dalam berpikir kritis terhadap ketimpangan yang ada di lingkungan sekitar kita.
2. Memberikan jawaban dan gambaran terhadap pokok permasalahan yang diteliti .
3. Memberikan informasi kepada pihak pemerintah untuk dapat bersikap aktif dan tanggap dalam menghadapi proses pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 di PT KTC, Serta menjadi bahan pertimbangan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan serta gambaran bagaimana dalam menangani atau menyelesaikan masalah yang ditimbulkan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹ Pemerintah telah membentuk suatu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang asuransi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, program tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat BPJS. Badan ini memiliki tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan nomor 24 tahun 2011 dimana tugasnya yaitu menyelenggarakan jaminan sosial Indonesia dan BPJS merupakan Badan Hukum Nirlaba. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 1 ayat satu yang berbunyi “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”.

2. Sejarah Pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

Sebelum RUU SJSN dibahas, Departemen Kesehatan (Kini Kemenkes menyiapkan RUU wajib Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) dan sementara pihak PT Jamsostek sedang mempersiapkan RUU Perubahan Jamsostek. Kesemuanya bermuara pada terwujudnya jaminan/asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ketika berbagai RUU dibahas, utusan *International Chamber of Commerce* (KADIN Internasional), mendatangi Menteri kesehatan dan

¹UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 ayat 1

menyampaikan ancaman bahwa apabila perusahaan diwajibkan mengiur, perusahaan asing akan menarik modalnya dari Indonesia. Gertakan demikian memang sudah sering dilakukan oleh pihak asing yang tidak menginginkan kemajuan bagi Indonesia, namun Tim penyusun tidak bergeming demi mewujudkan Undang-undang untuk menjamin seluruh rakyat.

Ketika memulai askes PNS (Pegawai Negeri Sipil), niat untuk mewujudkan jaminan/asuransi kesehatan untuk seluruh penduduk sudah daitancapkan oleh Menteri Kesehatan GA Siwabessy ketika itu. Mka disepakatilah bahwa hanya satu Undang-undang Jaminan sosial terpadu, mencakup jaminan kesehatan yang akan dibahas pemerintah dan DPR.² Rancangan UU akhirnya disusun. Penyelenggaraan sebuah sistem jaminan sosial disuatu negara memang mengundang percaturan politik karena sebuah sistem jaminan sosial menyangkut kepentingan seluruh rakyat. Selalu saja ada pro dan kontra dalam konsep besar maupun hal-hal teknis dalam dalam jaminan sosial.

Setelah bekerja lebih dari tiga tahun, Tim sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bersama DPR akhirnya berhasil merampungkan UU SJSN yang diundangkan dengan upacara khusus oleh presiden megawati pada tanggal 19 oktober 2004. Undang-undangnya yang disetujui rapat pleno DPR pada tanggal 28 September 2004. Belum pernah ada penandatanganan UU oleh Presiden dilakukan dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan seperti itu. Penandatanganan UU SJSN sehari sebelum Megawati meninggalkan keresidenan dengan mengundang menteri-mentridan anggota tim SJSN. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin

²Thabrani Hasbullah, *Jaminan Kesehatan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 223.

kabinetnya, mulai tanggal 20 Oktober, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengasuransikan 36 juta lebih penduduk miskin melalui PT Askes yang dimulai 1 Januari 2015. Meskipun awalnya tidak dimaksudkan untuk menjalankan UU SJSN, karena Menteri awalnya tidak tahu ada UU SJSN, secara substansial penjamin tersebut sejalan dengan jiwa UU SJSN. Awalnya kabinet SBY hanya ingin menyediakan perawatan RS gratis dikelas III, namun sebagian besar RS adalah milik pemda, bukan milik Kemenkes. Maka hal itu tidak mungkin diwujudkan. Perkenalan Dirut PT Askes, Orie Andari Soetadji, dengan menteri Siti Fadillah menelurkan solusi keinginan menyediakan perawatan gratis di kelas III RS melalui PT Askes. Dalam UU SJSN, PT Askes dinyatakan sebagai salah satu badan Penyelenggara dan iuran untuk penduduk miskin dan tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Kedua Konsep bertemu. Program tersebut kemudian diberi nama Askeskin dan disebutkan sebagai langkah awal pelaksanaan UU SJSN.³ Pada akhirnya kedua konsep bertemu yaitu konsep dari kabinet SBY yang ingin menyediakan perawatan gratis kepada masyarakat tidak mampu dengan UU SJSN.

Pemberian jaminan melalui PT Askes berbeda sekali dengan program percontohan pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) di Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Gorontalo yang sebelumnya digagas Kemenkes. Penjamin penduduk miskin melalui Askes menyebabkan para badan pelaksana JPKM di provinsi tersebut tidak mendapatkan peran. Perdebatan sesuai tidaknya ASKESKIN terjadi. Namun Menkes tetap pada pilihan uang memungkinkan seluruh penduduk miskin mendapat jaminan melalui Askeskin dengan iuran Rp 5000 per orang

³Thabrani Hasbullah, *Jaminan Kesehatan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 224.

perbulan, Besaran Iuran itu hanya separuh dari usulan PT Askes. Merasa gagal karena tidak mendapatkan peran para Bapel JKPM mengajukan uji materi (*judicial review*) UU SJSN ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 1 Februari 2005.⁴ Uji materi yang diajukan ke MK terjadi karena UUSJSN digunakan sebagai pertimbangan dalam keputusan menkes menugaskan pt askes menjalankan askeskin. Tidnakan menkes ketika itu dianggap seperti memberikan hak monopoli dan menutup hak daerah untuk mengembangkan jamian sosial. Pada pasal 5 ayat 3 UU SJSN menetapkan empat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang ada yaitu PT ASABRI, PT Askes, PT Jamsostek dan PT Taspen sebagai badan yang melaksanakan UU SJSN.

Keputusan MK tanggal 31 Agustus 2005 mengabulkan sebagian tuntutan dan menolak sebagian lagi. Yang menarik adalah bahwa MK sama sekali menolak permohonan pemohon 1 dan 2 (yaitu satpel JPKM Rembang dan Parbapel JPKM) dengan alasan bahwa keduanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) Artinya, keberadaan satpel dan bapel tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum. Putusan MK menerima permohonan pemohon 1 (DPRD Jatim) yang memang mempunyai kedudukan hukum dengan membatalkan pasal 5 ayat (2),(3),(4) yang disambut gembira oleh para pemohon namun, demikian MK sesungguhnya hanya membatalkan “bunyi” pasal-pasal tersebut. Pada halaman 270 keputusan MK dijelaskan bahwa “karena materi yang terkandung didalamnya telah tertampung dalam pasal 52 yang apabila dipertahankan keadaannya akan menimbulkan multitafsir dan ketidak pastian hukum”. Dengan demikian, keempat BPJS tersebut

⁴Thabrani Hasbullah, *Jaminan Kesehatan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 225-228

tetap sah menyelenggarakan program jaminan sosial tingkat nasional. Banyak pihak yang tidak mengetahui terselenggaranya JKN oleh BPJS melalui proses panjang.

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. Persyaratan dan tata cara kepesertaan dalam program jaminan sosial ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“PP 84/2013”). Dalam PP 84/2013 antara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif. Dalam sebuah pertemuan antara BPJS Kesehatan dan pengusaha akhirnya berbuah manis. Pengusaha diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersedia ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2015 dan perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya tepat pada saat itu. Hanya saja, ada beberapa catatan yang menjadi kesepakatan, yakni:

Pertama, untuk menyempurnakan skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB). Tenggang waktu rekonsiliasi data selama enam bulan. Selama masa itu, BPJS Kesehatan wajib memperbaiki fasilitas kesehatan dan tingkat pelayanan dan mendorong klinik-klinik milik badan usaha menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pada masa 1 Januari 30 Juni 2015, BPJS Kesehatan akan mengkoordinasikan kesiapan FKTP, mekanisme CoB dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin tingkat pelayanan yang baik bagi peserta BPJS Kesehatan. Salah seorang ketua, Apindo, Haryadi B Sukamdani, peningkatan kualitas menjadi solusi atas protes pengusaha atas CoB.⁵ CoB ini penting karena saat ini banyak perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan asuransi swasta untuk program jaminan kesehatan karyawannya.

3. Fungsi Dan Tugas BPJS Dalam Bidang Kesehatan

BPJS kesehatan sebagaimana yang terkandung dalam UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 9 ayat (1), bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1), BPJS kesehatan sebagaimana terkandung dalam ayat 10 bertugas untuk melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan Iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan memberikan informasi mengenai penyelenggara program jaminan sosial kepada

⁵[Http://bpjs-kesehatan.go.id](http://bpjs-kesehatan.go.id) (Diakses pada oktober 2017)

peserta dan masyarakat.⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan berperan penting dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat.

4. Program Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 6 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibagi menjadi 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya memiliki beberapa perbedaan yakni :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a BPJS Kesehatan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program :

- a. Jaminan kecelakaan kerja
- b. Jaminan Hari Tua
- c. Jaminan Pensiun dan
- d. Jaminan Kematian

Sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2011 kehadiran BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang telah ada sebelumnya yaitu Askes diganti menjadi BPJS Kesehatan dan Jamsostek diganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi tersebut masing-masing pada 1 Januari 2014 dan 1 Juli 2015. Berikut susunannya:

Pada 1 Januari 2014;

⁶UU RI Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 9 ayat 1 dan pasal 10.

- a. PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan
- b. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari Jamsostek bertransformasi menjadi JKN dari BPJS Kesehatan
- c. Program JKN diwajibkan untuk Seluruh Warga Negara Indonesia.

Pada 1 Juli 2015;

- a. PT. Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Program yang diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan adalah: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun Dan Jaminan Kematian.
- c. Program dari BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk seluruh penerima upah.⁷
Jadi PT. Jamsostek berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

5. Metode Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk secara khusus untuk dapat menyelenggarakan adanya program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang khusus dibentuk untuk dapat menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari BPJS Kesehatan? Perlu diketahui bahwa JKN adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan system asuransi. JKN itu sendiri merupakan program dari pelayanan kesehatan sedangkan BPJS Kesehatan adalah badan yang menyelenggarakan JKN.

Untuk kepesertaan BPJS, kepesertaannya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni :

⁷<https://www.panduanbpjs.com/perbedaan-bpjs-ketenagakerjaan/> (Diakses pada februari 2018).

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ditujukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Selain fakir miskin, mereka yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu masuk juga dalam kelompok ini.

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Kesehatan

Adapun BPJS Kesehatan yang bukan Penerima Bantuan Iuran Kesehatan ditujukan bagi pekerja penerima upah dan anggota keluarganya serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.⁸ Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bahwa kepesertaan Jaminan Sosial bersifat wajib, kemudian pasal 6 (1) Perpres nomor 111 tahun 2013 bahwa Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib mencakup seluruh penduduk Indonesia. Berikut adalah tahap kepesertaan Jaminan Kesehatan Perpres nomor 111 tahun 2013 harus dilaksanakan masing-masing pada:

a. Mulai tanggal 01 Januari 2014

Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Askes, TNI/POLRI peserta JPK Jamsostek harus mendaftarkan dirinya pada BPJS Kesehatan.

b. Paling lambat tanggal 01 Januari 2015

Bagi pemberi kerja BUMN, Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil.

c. Paling lambat tanggal 01 Januari 2016

Bagi Pemberi Kerja Mikro.

d. Paling lambat tanggal 01 Januari 2019

⁸Jimmy Joses Sembiring, *Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru* (Jakarta: PT Visimedia Pustaka (Anggota IKAPI), 2016),h.245.

Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Berikut ini adalah pengelompokan Penerima Bantuan Iuran dan Bukan Penerima Bantuan Iuran:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
 - a. Pekerja penerima upah
 - a) Pegawai Negeri Sipil
 - b) Anggota TNI
 - c) Anggota Polri
 - d) Pejabat Negara
 - e) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri
 - f) Pegawai Swasta
 - g) Pekerja yang Tidak termasuk huruf a sampai dengan f yang menerima upah.
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
 - a) Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri
 - b) Pekerja lain yang memenuhi criteria pekerja bukan penerima upah
 - c. Bukan Pekerja (BP)
 - a) Investor
 - b) Pemberi kerja
 - c) Penerima pension
 - d) Veteran
 - e) Perintis kemerdekaan

- f) Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.

Sedangkan bagi pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah yang telah membayar termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikut sertakan keluarga yang lain.

Berikut tempat pendaftaran peserta BPJS Kesehatan ada 3 (tiga) pilihan yakni:

1. Melalui Kantor BPJS Kesehatan
2. Pendaftaran melalui website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id
3. Melalui *Mobile Customer Service* BPJS *Corner* di Instansi terpilih.

4. Ketentuan Iuran BPJS Kesehatan

Ketentuan Iuran Peserta BPJS Kesehatan juga berbeda, berikut ini ketentuan dari Iuran masing-masing BPJS Kesehatan:

- a. Pekerja Penerima Upah
 - a) Pegawai Pemerintah (TNI, POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah, Pegawai pemerintah Non-PNS)

Pemberi kerja harus membayar Iuran 3% dari Gaji atau Upah per bulan, sedangkan Pekerja membayar Iuran 2% dari gaji atau Upah per bulan.

- b) Pegawai Swasta (Lainnya)

Pemberi kerja harus membayar Iuran 4.00% dari gaji atau upah per bulan, sedangkan Pekerja membayar 0.50% (Per tanggal 1 januari 2014 sampai dengan 30 juni 2015) dan 1% (per tanggal 1 Juli 2015) dari gaji atau upah perbulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

b. Pekerja Bukan Penerima Upah

Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah masing-masing membayar sendiri seluruh Iuran BPJS Kesehatan.

c. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Bagi Penerima Bantuan Iuran, seluruh dana pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah.⁹ Jadi penerima bantuan Iuran tidak mengeluarkan dana sedikitpun karena semua ditanggung oleh pemerintah.

B. Teori-Teori Jaminan Sosial Dalam Hukum Tata Negara Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Dari segi kebahasaan, makna hukum ialah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Menurut ahli ushul fiqih ialah ketetapan syara' terhadap orang yang mukallaf baik berupa tuntutan ataupun pilihan.¹⁰ Jadi, dari gabungan dua kata “hukum” dan “Islam” itulah muncul istilah hukum Islam. Dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Islam merupakan terjemahan dari Istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic law* sering digunakan para penulis barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka. Sebagai contoh dari buku-buku

⁹Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS (Jakarta: Visimedia, 2014),h.3-8.

¹⁰Yusran Asmuni, *Pengantar Study al-Qur'an, Al-hadits, Fiqih dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 89.

mereka yang terkenal adalah *Islamic law in Modern World* (1959) karya J.N.D Anderson, *An Introduction To Islamic Law* (1964) karya Joseph Schacht, dan *History Of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Kata *Islamic law* sering digunakan untuk menunjuk istilah Arab Fiqih Islam.

Ahmad Hasan menggunakan istilah *Islamic law* untuk fiqh dalam karya-karyanya seperti dalam buku *The Early Development Of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principle Of Islamic Jurisprudence* (1994). Istilah inilah yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Islam. Istilah ini kemudian banyak digunakan untuk istilah-istilah resmi seperti dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain sebagainya.¹¹ Hukum Islam itu adalah hukum yang selalu hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Ia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karena hukum Islam selalu dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang terus berkembang.¹² Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa yang muncul dan belum ada hukum yang mengaturnya, pasti akan memiliki hukum yang di istinbatkan oleh mujtahid dengan melakukan ijtihad. Itulah kenapa Islam dikatakan hukum Islam selalu mengikuti perkembangan zaman.

¹¹Marzuki, "Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam," Tinjauan Terhadap Buku *The Principles Of Islamic Jurisprudence: The Command Of The Shari'ah And Norm*, Oleh Ahmad Hasan, Adam Publisher Dan Distributors Cet. I (1994), h. 396.

¹²Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 21.

2. .Kategori Hukum Dalam Islam

Ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Muslim, yaitu hukum syariat, hukum fiqh dan *siyasah syar'iyah*.

1. Syariat

Menurut bahasa, syari'at berarti jalan menuju tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh atau jalan/ tempat mengalirnya air sungai. Kata "syari'at" diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam surat al-Ma'idah, 5: 48, asy-Syura, 42: 13 dan al-Jat'siyah, 48:18. Dalam ayat-ayat tersebut kata syari'at mengandung pengertian "jalan terang yang menuntun manusia pada keselamatan." Hal ini sesuai dengan pengertian kebahasaan, bahwa orang yang mengikuti syariat yang diturunkan Allah, maka ia menempuh jalan ke "pengairan" atau "sungai" yang dapat membersihkan jiwanya.

2. Fiqh

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "faqaha" diungkapkan dalam Al-qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya".

3. Siyasah Syar'iyah

Siyasah syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat

Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan para ulama mujtahid. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-sunnah.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyah, yaitu:

1. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf al-mafasid).
3. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.¹³ Berdasarkan hakikat syar'iyah diatas dapat kita simpulkan bahwa siyasah syar'iyah bersumber pad Al-Qur'an dan sunnah.

¹³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 1-6

Didalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan masyarakat, seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.¹⁴ Inilah yang melandasi pemerintah untuk menghadirkan BPJS kesehatan untuk kemaslahatan warga negara, dimana dengan BPJS Kesehatan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan, yang dulunya layanan kesehatan hanya dapat dinikmati segelintir orang.

3. Jaminan Sosial Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Jaminan sosial secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu jaminan dan sosial. Dalam hal ini, jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau rakyat. Kedua arti tersebut jika dianalogikan pihak yang satu adalah negara serta pihak yang lain adalah masyarakat (warga negara), sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwa seseorang dalam suatu negara wajib untuk menyetorkan iuran kepada negara secara kolektif dan universal guna menanggung dan menjamin kehidupan setiap warga negaranya yang membutuhkan.

Menurut Afzalur Rahman, jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup yang layak termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya. Islam meninggalkan pesan melalui sejarah

¹⁴Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990), h. 4.

kebudayaan yang erat dengan keadilan dan kesejahteraan. Jika meninjau kembali skema jaminan sosial yang berujung pada kesejahteraan, maka dalam prosesnya terdapat distribusi kekayaan dalam bentuk penjaminan. Sedangkan dana jaminan dalam hal ini salah satunya diambil dari dana warga negara yaitu infak dan sedekah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut. Ada asas-asas jaminan sosial yang dirumuskan dalam tiga hal yakni: asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan.

Dalam hal ini asas kemanusiaan merupakan asas yang bersinggungan dengan martabat manusia. Asas tersebut untuk mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an bahwa adanya persamaan antar manusia dihadapan Allah swt, tidak membedakan derajat antara sesama manusia, hanya saja yang membedakan adalah ketakwaanya sebagaimana firman Allah swt, dalam Qur'an Surah. Al-Hujurat (49:13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ۖ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁵

Asas manfaat tercermin dengan pemberian nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang yang layak, seperti sandang, pangan, papan, penjaminan pensiun, tabungan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pendidikan serta perumahan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Qur'an Surah. al-Nisa (4:36).

وَأَعِزُّوْا لِلَّهِ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَلَدِيْنَ إِحْسَنٌ ۚ إِنَّهُ يَبْذِي
 آلَ قُرْبَىٰ وَبِالْيَتَامَىٰ وَآلِ الْمَسْكِيْنَ وَآلَ الْجَارِ ذِي الْاَقْرَبِ ۚ وَالْجُنُبِ
 وَالصَّاحِبِ بِالْأَمْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦

Terjemahnya :

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.¹⁶

Asas keadilan berarti jaminan yang didistribusikan adalah merata kepada seluruh warga negara dengan tidak memandang status, pangkat, jabatan, kaya, hamper miskin dan bahkan miskin sekalipun akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama, sebagaimana firman Allah swt. dalam Qur'an Surah, al-Ma'idah (5:8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

¹⁵Kementrian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta:IKAPI JATIM, 2014), h. 745.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahannya*, h.109.

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁷

Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang *sustainable* dan *relatable*, dimana antara asas yang satu dengan yang lain akan saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial. Artinya, menghilangkan satu asas dari ketiga asas tersebut dalam system jaminan sosial, maka akan mengurangi makna dari jaminan sosial itu sendiri.¹⁸ Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan seluruh warga negara sudah sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip Siyash Syar'iyah yakni berpegang teguh pada asas manfaat, kemanusiaan dan keadilan.

Ada dua pendapat mengenai BPJS dikalangan para Ulama, yakni MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan NU (Nahdlatul Ulama) yang masing-masing berpendapat bahwa:

1. Majelis Ulama Indonesia

Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI 2015 MUI menyatakan bahwa Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip Syariah, karena mengandung unsur garar, maisir, dan riba. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk,

¹⁷Kementrian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 144.

¹⁸Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Econimica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017):237-262.

menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima. Majelis Ulama Indonesia menganggap bahwa BPJS kesehatan tidak sesuai dengan Syariah, yakni karena terindikasi mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Ini dikarenakan oleh, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.¹⁹ Hal ini dinilai oleh MUI mengandung unsur gharar, maisir dan riba, sehingga tidak sesuai syariah yang mengharamkan riba.

2. Nahdatul Ulama

Forum bahtsul masail pra muktamar ke-33 NU yang diselenggarakan PBNU di pesantren Krapyak Yogyakarta pada 28 Maret 2015 lalu, sepakat mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang ditangani BPJS Kesehatan. Mereka menyimpulkan bahwa konsep JKN yang ditangani BPJS Kesehatan tidak bermasalah menurut syariah Islam. Forum yang diikuti para kiai dari pelbagai daerah di Indonesia ini menetapkan bahwa BPJS sudah sesuai dengan syariat Islam. Mereka memandang akad yang digunakan BPJS Kesehatan sebagai akad ta'awun. Ketika disodorkan

¹⁹<https://imnasution.files.wordpress.com/2015/09/penjelasan-mui-tentang-bpjs.pdf> (Diakses pada Agustus 2018).

pertanyaan apakah mengandung riba, mereka menjawab bahwa akad BPJS tidak mengandung riba. Putusan ini diambil setelah para kiai berdiskusi langsung dengan Kepala Grup MKPR dr Andi Afdal Abdullah terkait pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS. Kepada dr Andi Afdal, para kiai mengajukan pelbagai pertanyaan seperti konsep iuran, penggunaan, besaran iuran, siapa pengguna BPJS, siapa yang dibebaskan dari iuran, dan pertanyaan lainnya yang dibutuhkan dalam bahtsul masail yang digelar pada sebuah sesi di malam hari.

Dengan diskusi pada orang teras BPJS, mereka mendapatkan tashawwurul amri, deskripsi persoalan secara utuh. Hasil diskusi ini yang dijadikan pedoman para kiai dalam memutuskan hukum BPJS. Ketua LBM PWNU Yogyakarta KH Ahmad Muzammil kepada NU Online pada Kamis (30/7) pagi mengatakan bahwa dulu jaminan itu hukumnya fardhu kifayah, tetapi sekarang fardhu ain bagi orang mampu untuk membayar iuran jaminan bagi mereka yang lemah ketika diwajibkan pemerintah. Konsep ta'awun yang diberlakukan BPJS, menurut Muzammil, masuk dalam bab jihad seperti disebutkan Fathul Mu'in yakni daf'u dhararin ma'shumin. Sehingga di sini pemerintah diposisikan sebagai administrator bagi orang kaya untuk membantu mereka yang lemah. "Kalau bicara halal-haram, BPJS sudah jelas halal. Tetapi harus dilihat apakah BPJS ini mengandung mashlahah atau mafsadah? Kita tinggal memperbaiki saja mana kekurangannya," sambil menunjuk kekurangan BPJS pada layanan kesehatan WNI di luar negeri.

Hadirnya BPJS ini memiliki latar belakang panjang, kata Muzammil. Awalnya dahulu masyarakat meminta layanan kesehatan gratis. Pemerintah kemudian memutar otak, lalu membuatkan jalan seperti ini. Sebagaimana dimaklumi bahwa putusan PBNU soal BPJS ini sudah dikeluarkan sejak 28 Maret lalu jauh sebelum

MUI mengeluarkan fatwa haram transaksi BPJS belakangan ini dengan alasan ketidakjelasan akad, gharar, dan maisir.²⁰

Jadi, dengan melihat penjelasan dan alasan masing-masing dari pihak MUI dan NU dapat diambil kesimpulan bahwa BPJS dalam hal ini BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan Syariah karena BPJS memiliki latar belakang dan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang memiliki kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan atau pengobatan yang notabenehnya sangat mahal. Adapun BPJS Kesehatan menurut NU masuk dalam akad Syirkah dengan konsp ta'awun, berikut penjelasan syirkah dan ta'awun:

1. Pengertian Syirkah

Secara etimologi, syirkah atau perkongsian berarti:

بعضهما عن لايمتزان بحيث بالآخر المالين أحد خلط أى الإختلاط

Artinya:

"Percampuran, yakni bercampunya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya."²¹

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.²²

²⁰<http://www.nu.or.id/post/read/61184/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam> (Diakses Pada 21 Agustus 2018)

²¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 183

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

Sedangkan menurut ulama ada perbedaan pendapat, yakni:

1. Menurut Hanafiah

Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan.

2. Menurut Malikiyah

Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.

3. Menurut syafi'iyah

Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama

4. Menurut Hanabilah

Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf. Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ulama mengenai pengertian dari syirkah bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah di laksanakan. Transaksi syirkah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama..²³ Jadi dapat disimpulkan bahwa Syirkah adalah kerjasama

²³H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 51

yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dengan menggabungkan modal untuk dikelola dengan untung dan rugi ditanggung bersama dengan dasar tolong-menolong.

Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Syirkah Pada dasarnya hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam saat itu. Beberapa dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang syirkah antara lain:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-syirkah itu, sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih.” (QS Shad 38:24)²⁴

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwasanya Allah SWT akan memberikan berkah ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka saling menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang dari mereka berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya. Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "²⁵

²⁴Kementrian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 735.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Missisi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Zibriqan, dari Abi Hayyan al-Taymi, dari bapaknya, dari Abi Hurairah berkata: Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”. (HR. Abu Daud no.3383).

Berdasarkan hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkongsian menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh, melainkan justru lebih dari hal itu disukai selama dalam perkongsian itu tidak ada tipu menipu. Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang di-syirkah-kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.

Melihat ayat dan hadis diatas maka dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan memang sudah sesuai dengan ajaran Syariah karena menjunjung tinggi kemaslahatan untuk sesama manusia, tanpa memandang agama karena syirkah juga dapat dilakukan dengan Non Muslim selama usaha tersebut tidak diharamkan bagi kaum muslim.

2. Ta'awun

Ta'awun adalah istilah tolong menolong dalam Islam. Sikap ta'awun ini menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan kaum muslimin. Pentingnya budaya ta'awun dalam kehidupan seorang muslim dipetegas dalam Qur'an Surah Al-maidah (5:2).

²⁵ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amru al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, juz III (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.), h. 256.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁶

Hal ini diperkuat oleh hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو
أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ،
كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»²⁷

²⁶ Kementrian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 156.

²⁷ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy al-naisabury, *Shahih Muslim*, juz IV (Beirut: Dar Ihya' al-Taras al-'Arabi, t.th.), h. 1999.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, dan Abu ‘Amir al-Asy’ari berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Idris, dan Abu Asamah, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-‘Alai Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mubarak, dan Ibnu Idris dan Abu Usamah, mereka mendapatkan dari Buraid, dari Abi Buraid, dari Abi Musa, berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.”

Maka dapat disimpulkan bahwa, BPJS Kesehatan dilandasi dengan akad syirkah dan dengan konsep ta’awun (Tolong-menolong) sangat sesuai dengan ruh Syariah karena akad, konsep dan tujuannya jelas untuk kemaslahatan warga negara Indonesia yang dalam hal ini fakir miskin dan orang tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah. Selain fakir miskin, mereka yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi adalah suatu sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Sedangkan penelitian (research) adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data dan kegunaan.¹

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, upaya untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) adapun alasan penulis melakukan penelitian yaitu peneliti tertarik mengkaji bagaimana penerapan sistem BPJS (Badan penyelenggara jaminan sosial) kesehatan pada perusahaan PT. KTC. Peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara analisis data. Lokasi penelitian dilakukan di PT. KTC Makassar terkait dengan masalah penerapan Program BPJS (Badan penyelenggara jaminan sosial) Kesehatan. Adapun alasan penulis memilih lokasi dalam skripsi ini di PT. KTC Persero Makassar ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program BPJS (Badan penyelenggara jaminan sosial) Kesehatan berdasarkan peraturan UU

¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, edisi 1 (Cet. 1; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), h. 1

NO. 24 tahun 2011 yang telah ditetapkan, serta faktor yang mendukung peneliti melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena secara pribadi penulis memiliki kenalan di daerah tersebut dan ingin mengkaji sejauh mana penyelenggaraan BPJS (Badan penyelenggara jaminan sosial) Kesehatan di PT. KTC Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.² Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan teologi dan normatif yaitu pendekatan Undang-Undang (statue approach) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendekatan Normatif, yaitu digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum tentang Pelaksanaan UU NO 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Hukum Tatanegara Islam Pada PT. KTC KTC Persero Makassar.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³ Data primer ini diperoleh dari hasil observasi,

²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, edisi 1 (Cet. 1; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), h.5

³Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.

dokumentasi dan wawancara atau hasil kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Dengan informan yang telah dipilih berikut:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a) Staf bagian Kantor Pt. KTC | : 1 orang |
| b) Karyawan Pt. KTC | : 10 orang |
| c) Ahli Tatanegara Islam | : 1 orang |
| Jumlah | : 12 orang |

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder berupa bacaan-bacaan yang berkaitan atau relevan dengan penelitian seperti buku-buku hukum yang ada di perpustakaan, jurnal, artikel dari media atau internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi, yaitu menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.⁵

⁴Sugiyono, *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, h. 224

⁵Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 51.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Prof. Dr. S. Nasution, M.A., wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.⁷ Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah "...alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian."⁸ Dimana suatu usaha memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif, yaitu peneliti yang berperan sebagai perencana,

⁶Moh.Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, h. 49.

⁷Suwardi Endarsawara, *Penelitian Kebudayaan:Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116

⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 224.

pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi:

- a. Peneliti sebagai instrumen utama
- b. Daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan,
- c. Camera,
- d. alat tulis.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data di artikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. *Reduksi* data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengolah dan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang data yang didapat.
- b. *Koding* data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal permasalahan dengan cara memberikan kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
- c. *Editing* data pemeriksaan hasil yang untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data dideskripsi dalam menemukan jawaban pokok masalah.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Yang bertujuan mengurangi data memecahkan masalah yang berdasarkan data yang di peroleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah, mengklarifikasi, dan mencatat yang dihasilkn catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.



BAB IV

PELAKSANAAN UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM TATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM PADA PT. KTC PERSERO MAKASSAR

A. Gambaran Umum PT. Katingen Timber Celebes

PT. Katingan Timber Celebes (dahulu PT. Katingan Timber Company) didirikan dalam rangka PMA yang permodalannya merupakan joint venture antara PT. Sarvha Ana (SWASTA INDONESIA) dengan Mitsui Overseas Forestry Development Co. Ltd. (SWASTA JEPANG) berdasarkan akta Notaris Kartini Mulyadi, SH. No. 11 tanggal 4 September 1973. Setelah memperoleh pengesahan akte pendirian oleh Menteri Kehakiman No.YA.5/402/20, tanggal 25 Oktober 1973, yang termuat dalam berita Negara RI pada tanggal 21 Desember 1973, maka perusahaan ini secara resmi berdiri sebagai perusahaan berbadan hukum, yang bergerak dibidang pengusahaan hutan dan penjualan hasil hutan (logging).¹

Pada awalnya berdirinya, perusahaan ini memiliki modal dasar sebesar US \$1.000.000 dan hak pengusahaan hutan seluas 110.000 ha di Sampit, Kalimantan Tengah. Sejalan dengan keluarnya kebijaksanaan pemerintah Indonesia yang membatasi ekspor kayu bulat dan mewajibkan para pemegang hak pengusahaan hutan untuk mendirikan pabrik pengolahan kayu, maka pada tahun 1980 manajemen perusahaan melakukan perluasan usaha dengan mendirikan pabrik kayu lapis. Adanya perluasan usaha ini adalah merupakan kerjasama antara PT. Mas Kumambang, PT. Sarvha Ana dan Mitsui Overseas Forestry Development Co. Ltd, serta Mitsui Lumber

¹Amaliah, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Katingan Timber Celebes," (skripsi Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNHAS Makassar, 2011), h. 63.

dan Mitsui Co.² Melalui surat persetujuan perluasan dari BKPM No.09/II/PMA/1982, tanggal 25 Mei 1982, maka berdirilah pabrik kayu lapis di Makassar, dengan kapasitas 53.550 m³. Sejalan dengan perluasan usaha ini, maka kepemilikan saham dan jumlah modal juga mengalami perubahan sesuai dengan akta notaries Raden Soerajo Wongsowidjojo, SH, No. 25 tanggal 22 September 1992, yakni Mitsui Overseas Forestry Development Co. Ltd, Mitsui Lumber, PT. Sarvha Ana dan PT. Mas Kumambang dengan modal sebesar US \$ 4.000.000. Pertimbangan dipilihnya Makassar sebagai lokasi pabrik kayu lapis adalah karena tersedianya tenaga kerja yang murah, jalur transportasi darat kepelabuhan yang cukup baik dan mudah serta jalur transportasi laut pabrik cukup murah dan lancar, disamping untuk meraih pasar lokal khususnya KTI. Pabrik di Makassar ini dibangun Agustus 1982 dan mulai memproduksi secara komersial pada Januari 1984.³

Berdasarkan akte notaris Linaswati, SH tanggal 29 November 2012 dan telah memperoleh pengesahan kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH-01.10-45838 terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi:

1. Komisaris Utama : Nn. Jacqueline Sitorus
2. Komisaris : Alfred Rusli
3. Direktur Utama : Max Pancaka Ramajaya
4. Wakil Direktur Utama : Franklyn William Kayhatu
5. Direktur : Bhimo Wiweko
6. Direktur : Hui Kwan

² Mardy Billy Regino, “Analisis pengendalian Mutu Dengan Metode Six Sigma Pada P. Katingan Timber Celebes Di Makassar, Sulawesi selatan,” (skripsi Thesis, Fkultas Ekonomi Dan Bisnis UNHAS Makassar, 2014), 43-44.

³ Amaliah, “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Katingan Timber Celebes,” (skripsi Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNHAS Makassar, 2011), h. 64-65.

7. General Manager : Aslimin Salim

PT. Katingan Timber Celebes memproduksi Plywod berdasarkan pesanan dan kesepakatan dengan pembeli dengan kapasitas terpasang 53.550 m³/ tahun. Pemasaran Plywood PT. KTC adalah berorientasi ekspor. Tujuan pemasaran terbesar adalah Jepang, kemudian Eropa dan berapa perusahaan *Secondary Process asal Jepang yang membangun pabrik pengolahannya di Jepang.*⁴ Sampai saat ini, sistem kerja pada PT. KTC masih memproduksi berdasarkan pesananan.

1. Sistem Kerja

Bagian produksi PT. Katingan Timber Celebes memiliki tenaga kerja berjumlah 1236 orang yang waktu kerjanya adalah setiap hari kecuali hari besar (tanggal merah). Perincian waktu kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Shift A 07.00 - 15.00 WITA
- b. Shift B 15.00 – 23.00 WITA
- c. Shift C 23.00 – 07.00 WITA

PT. Katingan Timber Celebes memiliki tipe produksi yaitu Job Order. Hal ini dilakukan agar seluruh permintaan pelanggan dapat terpenuhi. Job Order dilakukan pada divisi KTC I. Yang menangani produksi plywood / tripleks (Sumono dan Floorbase). Sedangkan KTC II memproduksi Sawn Timber dan Lumber Core yang berasal dari bahan-bahan baku plywood yang tidak sesuai standar mutu produksi plywood.

⁴Amaliah, “*Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Katingan Timber Celebes,*”, (skripsi Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNHAS Makassar, 2011), h. 66.

2. Kegiatan Produksi

PT. Katingan Timber Celebes merupakan suatu perusahaan yang mempunyai kegiatan di bidang usaha industri forestry terutama pembuatan plywood, dimana pemasarannya dikhususkan pada Ekspor terutama untuk produk Sumono dan Floorbase. Perusahaan menerima order plywood yang bersifat umum berdasarkan pesanan oleh konsumen, sehingga spesifikasi yang dibuat juga disesuaikan dengan keinginan konsumen baik dari segi bahan baku, desain, maupun modelnya. Dalam kegiatan produksinya, PT. Katingan Timber Celebes melakukan beberapa kegiatan yang secara garis besarnya meliputi pengolahan bahan baku log kayu menjadi produk forestry yang siap pakai.

3. Hasil Produksi

Jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh PT. Katingan Timber Celebes adalah produk forestry, antara lain:

- a. Plywood
- b. Sawn Timber
- c. Lumber Core
- d. Polyester
- e. Bahan Baku Produksi

Bahan-bahan/material utama yang digunakan PT. Katingan Timber Celebes untuk proses produksi plywood diantaranya adalah log Kayu jenis Meranti dan Campuran

f. Mesin Produksi

Mesin-mesin yang digunakan PT. Katingan Timber Celebes untuk proses

plywood adalah sebagai berikut

- a. Log: mesin Log Cutting Bar STIHL sebanyak satu buah untuk memotong log kayu dan mesin Log Cleaner HASHIMOTO sebanyak satu buah untuk membersihkan log.
- b. Rotary: mesin Rotary Lathe Uroko sebanyak 6 buah dan mesin Arisun HASHIMOTO sebanyak lima buah untuk pengupasan veneer f/b dan veneer poly-poly. Mesin Grinder Toyo Knife dan Grinder Kanefusa untuk mengasah pisau mesin Rotary.
- c. Dryer: mesin Dryer Minami sebanyak satu buah, mesin Dryer CHIH HUANQ sebanyak dua buah, dan mesin Dryer WUXINATURE sebanyak satu buah untuk mengeringkan veneer f/b dan veneer poly-poly.
- d. Composer: mesin Composer HASHIMOTO DENKI sebanyak empat buah dan mesin Composer MEINAN sebanyak sepuluh buah.
- e. Glue Spreader mesin Glue Spreader TAIHEI sebanyak tiga buah, mesin Glue Spreader MINAMI sebanyak satu buah, dan mesin Glue Spreader HONGSING sebanyak satu buah.
- f. Cold Press: mesin Cold Press KITAGAWA sebanyak 6 buah dan mesin Cold Press HONGSING sebanyak 4 buah.
- g. Hot Press: mesin Hot Press TAIHEI sebanyak satu buah.
- h. Mesin Hot Press KITAGAWA sebanyak satu buah, dan mesin
- i. Hot Press YAMAMOTO sebanyak satu buah.
- j. D. Saw: mesin D. Saw TAIHEI sebanyak dua buah.

k. Sander: mesin Sander KIKUKAWA sebanyak dua buah.⁵

B. Pelaksanaan UU NO. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada PT. KTC Persero Makassar

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai implementasi suatu rancangan atau kebijakan, dalam hal ini kebijakan yang dimaksud yakni UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS. Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau mekanisme yang dibingkaipada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan sebuah kebijakan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

⁵ Mardy Billy Regino, "Analisis pengendalian Mutu Dengan Metode Six Sigma Pada P. Katingan Timber Celebes Di Makassar, Sulawesi selatan," 45-46.

⁶ Ramdhani Abdullah dan Ali R. Muhammad, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," Jurnal Publik11, no. 01 (2017): h. 1.

Pemerintah telah membentuk suatu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang asuransi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, program tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat BPJS. Badan ini memiliki tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan nomor 24 tahun 2011 dimana tugasnya yaitu menyelenggarakan jaminan sosial Indonesia dan BPJS merupakan Badan Hukum Nirlaba. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 1 ayat satu yang berbunyi “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”.⁷

BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggungjawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pension PNS dan TNI/POLRI, Veeran, Perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenaga kerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan beroperasi sejak tanggal 1 januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 juli 2014.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan

⁷ UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 ayat 1

wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Begitupun dengan PT. KTC.

Heriyanto selaku Staf personalia PT. KTC, mengatakan bahwa PT. KTC telah mendaftarkan seluruh karyawannya setelah BPJS mengharuskan semua Perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya untuk menjadi anggota BPJS. Karyawan yang sudah terhitung 3 bulan masa kerja sudah dapat didaftarkan sebagai anggota BPJS. Begitupun bagi karyawan yang telah berkeluarga juga harus didaftarkan anak dan istrinya pada BPJS oleh perusahaan. Persyaratan yang harus dilengkapi karyawan untuk didaftarkan pada BPJS yaitu foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP. Mengenai pembayaran Iuran BPJS karyawan, PT. KTC menanggung sebagian dari Iuran BPJS karyawannya beserta anak dan istri karyawan tersebut. Semua karyawan PT. KTC didaftarkan pada golongan kelas 2 pada BPJS. Iuran BPJS kelas 2 yang senilai Rp 50.000,00 yang ditanggung oleh karyawan hanya senilai Rp 28.441,00 begitupun anak dan istri karyawan. Perusahaan mengumpulkan Iuran karyawan dengan cara diambil langsung dari gaji karyawan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk para karyawan terlambat dalam membayarkan Iuran keanggotaan BPJS. Dengan hadirnya BPJS Kesehatan di PT. KTC sangat membantu karyawan, sebab karyawan diberikan keringanan pembayaran Iuran oleh perusahaan, serta mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, karena sebagian iuran keanggotaan BPJS ditanggung oleh perusahaan.⁸

Hamriani dari hasil wawancara beliau menambahkan bahwa ada beberapa kendala yang dirasakan oleh karyawan yaitu yang pertama, seringkali perusahaan tidak menyetorkan Iuran BPJS karyawan kepada pihak BPJS kesehatan. Terhitung bulan Maret 2018 sampai sekarang Juli 2018 pihak perusahaan belum menyetorkan

⁸Heriyanto (30 tahun), Staf Personalia PT. KTC, *Wawancara*, Makassar, 6 Agustus 2018.

Iuran BPJS kesehatan karyawan. Akibatnya Karyawan tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan pada paskes yang telah ditunjuk menjadi tempatnya mendapatkan layanan kesehatan karena kartu keanggotaan tidak dapat digunakan.⁹

Sumarni dari hasil wawancara menambahkan yang kedua jika salah satu karyawan memiliki keluhan mengenai BPJS, karyawan harus mengurus sendiri ke kantor BPJS namun jika yang memiliki keluhan ada beberapa orang yang menangani untuk melakukan komplain ke kantor BPJS adalah pihak kantor. Kedua, bagi karyawan yang pernah di jeda (di rumahkan) dan di pekerjaan kembali, terjadi masalah keaktifan kartu keanggotaan BPJS. Kartu keanggotaan BPJS yang bersangkutan tidak aktif namun Iuran bulanan karyawan tetap terpotong dari gaji karyawan tersebut. Ini dikarenakan belum dilakukannya pembaharuan data karyawan yang bersangkutan, jadi karyawan yang merasa telah membayar iuran dan mendatangi Puskesmas faskesnya untuk berobat tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan karena keanggotaannya pada BPJS Kesehatan ternyata tidak aktif.¹⁰

Secara umum semua karyawan PT. KTC merasa sangat bersyukur dan sangat terbantu dengan diberlakukannya keharusan perusahaan untuk mendaftarkan karyawan pada BPJS. Perusahaan dinilai sangat membantu dengan menanggung sebagian Iuran BPJS Karyawan beserta keluarga. Jika saja pihak perusahaan menjalankan atau melaksanakan program ini sebagaimana mestinya.

Namun, pada kenyataannya karyawan menjadi sangat dirugikan dengan tidak membayarkan Iuran bulanan karyawan kepada BPJS Kesehatan. Pihak perusahaan melanggar UU NO 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 19 ayat 2 yang berbunyi

⁹Hamriani (25 tahun), Karyawan PT. KTC, *Wawancara*, Makassar, 6 Agustus 2018.

¹⁰Sumarni (35 tahun), Karya PT. KTC, *Wawancara*, Makassar, 6 Agustus 2018.

“Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”. Oleh karena itu PT. KTC jelas tidak melaksanakan UU NO 24 Tahun 2011 tentang BPJS sebagaimana mestinya.

C. Pandangan Hukum Tatanegara Islam Terhadap badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Pada PT. KTC

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹¹Pemerintah telah membentuk suatu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang asuransi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, program tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat BPJS. Badan ini memiliki tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan nomor 24 tahun 2011 dimana tugasnya yaitu menyelenggarakan jaminan sosial Indonesia dan BPJS merupakan Badan Hukum Nirlaba.

BPJS Kesehatan dikalangan Ulama terjadi perbedaan pendapat, yakni ada yang mengatakan BPJS Kesehatan mengandung unsur unsur gharar, maisir dan riba. Namun pendapat lain mengatakan BPJS Kesehaatan sudah sesuai dengan Syari'ah karena sesuai dengan UU NO 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 2 yang menyatakan bahwa “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Itu sesuai dengan syariah yang terkandung dalam al-Qur'an surah masuk ke dalam akad Syirkah dengan prinsip ta'awun yakni kerjasama yang berlandaskan prinsip tolong-menolong. Mengapa demikian karena dengan melihat dari aspek masalah atau manfaat kehadiran BPJS Kesehatan ini sangat memberikan manfaat besar bagi kalangan

¹¹UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 ayat 1

menengah kebawah untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pengobatan. Prinsip Ta'awun atau tolong menolong ini terletak pada subsidi silang, dimana subsidi silang yang memanfaatkan jumlah peserta sehingga dapat menerapkan prinsip gotong-royong atau tolong-menolong.

Namun, pada prakteknya Pada PT. KTC tidak menjalankan atau melaksanakan BPJS Kesehatan sebagaimana yang terkandung dalam UU No 24 tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan pasal 19 ayat 2 yang berbunyi “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS” dengan tidak menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya selama 4 bulan lamanya. Hal ini sudah melenceng dari asas penyelenggaraan BPJS serta sudah tidak sesuai dengan Syari'ah dan jelas melanggar ketentuan Syirkah dan prinsip ta'awun. Sesuai dengan sabda Rasulullah, Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّييُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "¹²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Missisi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Zibriqan, dari Abi Hayyan al-Taymi, dari ayahnya, dari Abi Hurairah berkata: Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”. (HR. Abu Daud no.3383).

¹² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amru al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, juz III (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.), h. 256.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan UU NO 24 tahun 2011 Tentang BPJS di PT KTC sudah melenceng dari ketetapan syirkah dengan prinsip ta'awun dan tidak sesuai dengan Hukum Tata Negara Islam. Karena pada pelaksanaannya secara langsung maupun tidak langsung salah satu pihak telah tidak amanah dalam menjalankan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam hal ini adalah PT KTC yang tidak membayar atau menyampaikan kewajiban Iuran kepada BPJS Kesehatan. Dimana para karyawan sangat membutuhkan kelancarannya Iuran dikarenakan pada perusahaan karyawan bekerja keras dan berhadapan dengan mesin-mesin yang tidak jarang ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan jika keanggotaannya pada BPJS Kesehatan tidak aktif atau iurannya tidak dibayarkan maka karyawan yang mengalami kecelakaan kerja akan kesulitan mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya, begitupun dengan karyawan yang terganggu kesehatannya akan sulit mendapatkan pelayanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum semua karyawan PT. KTC merasa sangat bersyukur dan sangat terbantu dengan diberlakukannya keharusan perusahaan untuk mendaftarkan karyawan pada BPJS. Perusahaan dinilai sangat membantu dengan menanggung sebagian Iuran BPJS Karyawan beserta keluarga. Jika saja pihak perusahaan menjalankan atau melaksanakan program ini sebagaimana mestinya. Namun, pada kenyataannya karyawan menjadi dirugikan dengan tidak membayarkan Iuran bulanan karyawan kepada BPJS Kesehatan. Pihak perusahaan melanggar UU NO 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 19 ayat 2 yang berbunyi “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”. Oleh karena itu PT. KTC jelas tidak melaksanakan UU NO 24 Tahun 2011 tentang BPJS sebagaimana mestinya.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan UU No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial di PT. KTC ada beberapa kendala yang dirasakan oleh karyawan yaitu yang pertama, seringkali perusahaan tidak menyetorkan Iuran BPJS karyawan kepada pihak BPJS kesehatan. Terhitung bulan Maret 2018 sampai sekarang Juli 2018 pihak perusahaan belum menyetorkan Iuran BPJS kesehatan karyawan. Akibatnya Karyawan

tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan pada paskes yang telah ditunjuk menjadi tempatnya mendapatkan layanan kesehatan karena kartu keanggotaan tidak dapat digunakan. Yang kedua jika salah satu karyawan memiliki keluhan mengenai BPJS, karyawan harus mengurus sendiri ke kantor BPJS namun jika yang memiliki keluhan ada beberapa orang yang menangani untuk melakukan komplain ke kantor BPJS adalah pihak kantor. Kedua, bagi karyawan yang pernah di jeda (di rumahkan) dan di pekerjaan kembali, terjadi masalah keaktifan kartu keanggotaan BPJS. Kartu keanggotaan BPJS yang bersangkutan tidak aktif namun Iuran bulanan karyawan tetap terpotong dari gaji karyawan tersebut. Ini dikarenakan belum dilakukannya pembaharuan data karyawan yang bersangkutan, jadi karyawan yang merasa telah membayar iuran dan mendatangi Puskesmas faskesnya untuk berobat tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan karena keanggotaannya pada BPJS Kesehatan ternyata tidak aktif.

3. Pada prakteknya Pada PT. KTC tidak melaksanakan BPJS Kesehatan sebagaimana yang terkandung dalam UU No 24 tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan pasal 19 ayat 2 yang berbunyi “Pemberi Kerja wajib membayarkan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS” dengan tidak menyetorkan Iuran yang menjadi tanggungjawabnya selama 4 bulan lamanya. Hal ini sudah jelas melenceng dari asas penyelenggaraan BPJS serta sudah tidak sesuai dengan Syari’ah dan jelas melanggar ketentuan Syirkah dan prinsip ta’awun. Maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan UU NO 24 tahun 2011 Tentang BPJS di PT KTC sudah

melenceng dari ketetapan syirkah dengan prinsip ta'awun dan tidak sesuai dengan Hukum Tata Negara Islam.

B. Implikasi Penelitian

Mengingat bahwa dengan diberlakukannya keharusan perusahaan mendaftarkan karyawannya menjadi anggota BPJS dan menanggung sebagian Iuran bulanan keanggotaan BPJS karyawan beserta anak dan istrinya, maka kehadiran BPJS sangat membantu karyawan PT. KTC dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan meringankan beban kehidupan karyawan, perlukiranya pihak BPJS dan perusahaan lebih memperhatikan dan mengoptimalkan pelayanan terhadap karyawan yang memiliki keluhan terhadap masalah keaktifan keanggotaan kartu BPJS.

Terkait dengan adanya beberapa kendala yang dirasakan oleh karyawan terkait dengan keaktifan kartu keanggotaan BPJS, peneliti menyarankan agar:

1. Pihak Perusahaan harus melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan Iuran karyawan PT. KTC dengan tepat waktu, agar karyawan dapat memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya sehingga kinerja karyawan tidak terganggu dan apabila terjadi kecelakaan kerja karyawan dapat segera mendapatkan pertolongan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Pihak perusahaan PT. KTC agar senantiasa memperbaharui atau *refresh* data karyawan setiap ada perubahan data dan jumlah karyawan agar tidak terjadi lagi peristiwa penolakan karyawan oleh pihak puskesmas faskes tingkat 1 karyawan yang bersangkutan.

KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, kairo-Mesir, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1956 M /1376 H) dikutip dalam Sabri Samin, *Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan dalam Islam (fiqih dusturi)*, Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of The Shari'ah and Juridical Norm, Volume 1*, Delhi: Adam Publisher dan Distributors, Cet. I, 1994), Dikutip dalam Jurnal Marzuki, *Tinjauan Umum tentang Hukum Islam*.
- As-Sayid Rasyid Ridha dalam Kitabnya *Al-wahyul Muhammadi*; dikutip dalam Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amru al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, juz III (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.).
- Amaliah, "*Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Katingan Timber Celebes*," skripsi Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNHAS Makassar, 2011.
- Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurna Ekonomi, 2013.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Hasil Keputusan MUI Dan Hasil Keputusan NU*", Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Jurnal Marzuki, *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*.
- Jimmy Joses Sembiring, *Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, Jakarta, PT Visimedia Pustaka (Anggota IKAPI), 2016.
- Kementrian Agama RI

<https://www.panduanbpjs.com/perbedaan-bpjs-ketenagakerjaan/>

- Moh.Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, Jakarta:PT.Bumi Aksara 2005.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata negara ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mardy Billy Regino, "Analisis pengendalian Mutu Dengan Metode Six Sigma Pada P. Katingan Timber Celebes Di Makassar, Sulawesi selatan," skripsi Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNHAS Makassar, 2014.
- Muhaemin, *Al-Qur'an Dan Hadist*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy al-naisabury, *Shahih Muslim*, juz IV (Beirut: Dar Ihya' al-Taraş al-'Arabi, t.th.).
- Marzuki, "Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam," *Tinjauan Terhadap Buku The Principles Of Islamic Jurisprudence: The Command Of The Shari'ah And Norm*, Oleh Ahmad Hasan, Adam Publisher Dan Distributors Cet. I, 1994.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam* "Econimica. Jurnal Ekonomi Islam, 2017.
- Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS*, Jakarta, Visimedia, 2014.
- Pulungan, J. Suyuti, *Prinsip-prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*. Jakarta: Raja Grapimdo Persada, 1996.
- Ramdhani Abdullah dan Ali R. Muhammad, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal, 2017.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabet, 2009
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional sbuah introduksi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Suwardi Endarsawara, *Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistemologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Sjadzali Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990.

Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2013

Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*.

Thabrany Hasbullah, *Jaminan Kesehatan Nasional*, edisi kedua. Cet. 3: Jakarta: Rajawali Pers 2016.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi kedua. Cet. 13: Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Yusran Asmuni, *Pengantar Studyal-Qur'an, Al-hadits, Fiqih dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Yusuf Bachtiar, *Status BPJS Kesehatan Menurut Islam: Studi Komparatif Menurut*

Zaenal Asikin, Agusfian Wahab, Zaeni Asyhadie, Lalu Husni, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006.

Zuhairini, *Metodologi Pendidikan Agama*. Solo : Ramadhani, 1993.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

<https://imnasution.files.wordpress.com/2015/09/penjelasan-mui-tentang-bpjs.pdf>

<http://www.nu.or.id/post/read/61184/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam>.

[Http://bpjs-kesehatan.go.id](http://bpjs-kesehatan.go.id)

UU RI Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

<https://www.panduanbpjs.com/perbedaan-bpjs-ketenagakerjaan>.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R





Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herryanto

Usia : 30 tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Jabatan : Staf Personalia

Menyatakan bahwa saudara Sumacni telah melakukan wawancara sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 7 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR


(Herryanto)

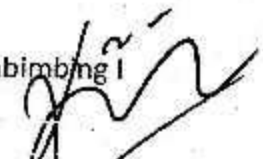
FORMULIR
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1. Nama : SUMAENI
2. NIM : 10200114220
3. Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan UU No 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(study Kasus Di PT KTC PERSERO MAKASSAR)
4. Rencana Seminar Proposal


- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Samata, 2018

Pembimbing I



Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi
NIP. 19740627 200604 2 002

Pembimbing II


Hj. Rakhmawati, M. Pd
NIP. 19771005 200901 2 005

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan


Dra. Nifa Sastrawati, M. Si
NIP. 19710712 199703 2 002

*) Bagi Mahasiswa yang akan seminar proposal, harus menyerahkan formulir ini 3 hari kerja sebelum hari seminar.

DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR PROPOSAL (S1)

NAMA : RISWAN. R

NIM : 10100113062

JURUSAN : Hukum Acara Peradilan dan kekeluargaan

JUDUL SKRIPSI : Signifikasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B (Studi Kasus Tahun 2015-2016)

NO	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	Ketua	1.
2	Dr. Hj. Patimah, M.Ag.	Sekretaris	2.
3	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	Penguji I	3.
4	Andi Intan Cahyani, S.Ag.,M.Ag.	Penguji II	4.
5	Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I.	Pembimbing I	5.
6	Dr. Musfikah Ilyas, M.H.I.	Pembimbing II	6.
7	Sri Hayati, S.H.I.	Pelaksana	7.
8	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8.
9	Riswan. R	Mahasiswa	9.

Samata, 13 Februari 2018

Ketua Panitia

^{3v} Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP 19621016 199003 1 003

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: 1966HPK/2016

Judul Skripsi: **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Hukum Tatanegara Islam.**

Gowa, 31 Juli 2018

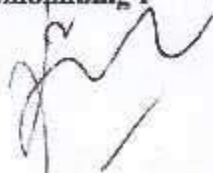
Penyusun,



Sumaeni

Nim. 10200114220

Pembimbing I



Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi

Nip. 19740627 200604 2 002

Pembimbing II

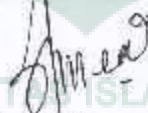


Rahmiati, M. Pd

Nip. 19771005 200901 2 005

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



Dra. Nila Sastrawati, M. Si

Nip. 19710712199703 2 002

Disahkan Oleh:

a.n Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Kuasa Nomor : B-1892/SIL.01/KP.07.6/07.6/07/2018

UIN Alauddin Makassar



Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag

Nip. 19711020 199703 1 002

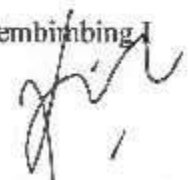
PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi saudara **SUMAENI, NIM: 10200114220**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *"Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Hukum Tata Negara Islam"* Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah (Akhir).


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 12 Agustus 2018


Pembimbing I


Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi
Nip. 19740627 200604 2 002


Pembimbing II


Rahmiati, M. Pd
Nip. 19771005 200901 2 005

Penguji I


Dr. Dudung Abdullah, M.Ag
NIP. 19540203 198503 1 002

Penguji II


Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag
NIP. 19581025 199603 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haworani
Usia : 25 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Karyawan

Menyatakan bahwa saudara Sumacni telah melakukan wawancara sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 7 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
(Haworani)

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi

Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Fakultas Syariah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr,Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumaeni

Nim : 10200114220

Semester/klpk : VI/HPK E

Angkatan :2014

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut:

1. Tinjauan terhadap pelaksanaan UU RI nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jasa sosial di PT-KTC (studi di PT-KTC persero makassar)
2. Kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung serentak RT/RW di kota makassar berdasarkan peraturan walikota (PERWALI) makassar nomor 72 tahun 2016 (studi di desa lakkang kecamatan Tallo)
3. Efektivitas pengawasan penyaluran RASKIN yg di lakukan oleh badan pengelola beras RASKIN di pulau terpencil (studi di pula Bontosua Kecamatan Luukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep)

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu Mussalam Wr,Wb

17 April 2017

Mengetahui

Penasehat Akademik

Dra. Nita Sastrawati, M.Si

Pemohon

Sumaeni

DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Sumaeni

NIM : 10200114220

JURUSAN : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

JUDUL SKRIPSI: "Tinjauan terhadap Pelaksanaan UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jasa Sosial di PT. KTC Persero Makassar)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	Ketua	1.
2.	Dr. Kurniati, M.H.I	Sekretaris	2.
3.	Dr. Kurniati, M.H.I	Pembimbing	3.
4.	Hj. Rahmiati, S.Pd, M.Pd	Pembimbing	4.
5.	Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	Penguji	5.
6.	Subehan Khalik, S.Ag, M.Ag	Penguji	6.
7.	Nasirah Asri, S. Kom	Pelaksana	7.
8.	Nursyamsi, ST	Pelaksana	8.
9.	Sumaeni	Mahasiswa	9.

Samata Gowa, 28 Maret 2018

Ketua Panitia

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP : 19621016 199003 1 003

RIWAYAT HIDUP



Sumaeni, anak ke empat dari lima bersaudara ini adalah putri kandung dari pasangan bapak Samaila ibu Hanna di Pulau Bonto Sua pada tanggal 11 Juni 1995.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 34 Pulau Bontosua (*lulus tahun 2008*), melanjutkan ke SMPN 4 SATAP Bungoro, lalu pindah ke SMN 28 (*lulus pada SMPN 28 Makassar tahun 2011*) dan SMAN 1 Liukang Tupabbiring (*lulus tahun 2014*), dan sekarang menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Pt Ktc (Perspektif Hukum Tatanegara Islam)”.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR